

PENDIDIKAN ERA DIGITAL: ANTARA KEKUASAAN KAUM ELITE DAN PENDIDIKAN KAUM AKADEMISI

Oleh: Heribertus Solosumantro

(Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif/ IFTK Ledalero)

Pengantar

Wacana tentang pendidikan digital akhir-akhir ini menjadi *trending topic* yang meresahkan sudut pandang para akademisi di kalangan masyarakat Indonesia. Hampir setiap media menarasikan bagaimana kekuatan pendidikan digital dalam membangun masa depan Indonesia dengan berbagai kemudahan-kemudahan seperti mengakses informasi dan komunikasi secara cepat, lancar dan tak terbatas, banyaknya media pendukung pembelajaran serta pengetahuan baru tentang teknologi itu sendiri. Bahkan, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia juga menuturkan bahwa salah satu agenda kebijakan penting yang dibahas pada tahun 2021 ini adalah penerapan pendidikan digital bagi masyarakat Indonesia.¹ Salah satu bentuk pelaksanaan konkrit yang dapat dilihat saat ini yakni pembagian kuota internet gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Realitas ini secara singkat menggambarkan kekuatan utama pendidikan dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia itu sendiri.

Menilik realitas yang terjadi dalam keberlangsungan pendidikan kaum akademisi (Guru, mahasiswa, dosen, siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya) tampak terjadi penyimpangan yang melanggar hak pendidikan kaum akademisi itu sendiri. Sumbo Tinarbuko dalam tulisannya menegaskan bahwa kuasa administrasi pendidikan (kaum elite/birokrat pendidikan) membelenggu tugas serta fungsi dosen sebagai akademisi dan intelektual kampus dikarenakan minimnya kinerja kerja akademisi dalam memperhatikan kehidupan pendidikannya dibandingkan mengurus administrasi pendidikan itu sendiri.² Realitas ini membawa kaum akademisi pada sikap dilema antara memperhatikan pembangunan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa atau sibuk mengurus kepentingan kaum elite/birokrat yang menekankan investasi yang barangkali belum jelas tujuannya.

¹Ayunda Pininta Kasih, "Kemendikbud Bakal Upayakan Digitalisasi Sekolah pada 2021" *Kompas*, 28 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/28/073913971/kemendikbud-bakal-upayakan-digitalisasi-sekolah-pada-2021?page=all>, diakses pada 18 Oktober 2021.

²Sumbo Tinarbuko, "Dosen, Intelektual Kampus atau Administrator Pendidikan", *Kompas*, 20 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/20/dosen-intelektual-kampus-atau-administrator-pendidikan>, diakses pada 18 Oktober 2021.

Pendidikan era digital yang menjadi pendidikan adaptif saat ini perlu menggarisbawahi kembali makna dan tujuan pendidikan itu sendiri. Atas dasar pemahaman ini pula penulis mencoba menelaah secara kritis realitas pendidikan era digital yang terjadi dalam kehidupan kaum elite pendidikan yang berbanding terbalik dengan kehidupan akademisi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tinjauan ini juga merujuk pada refleksi kritis melihat realitas bahwa terjadi degradasi nilai pendidikan dalam kehidupan akademisi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hakikat Pendidikan Era Digital

Pendidikan merupakan berbagai macam cara, yang mana di dalamnya terdapat pengetahuan dan pembelajaran khusus, baik yang bersifat informasi faktual dan keterampilan maupun nilai-nilai dan norma budaya yang ditransferkan kepada anggota masyarakat.³ Pengertian pendidikan ini ditilik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *ducare* yang berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”.⁴

Pendidikan sebagai alat yang menuntun keluar ini membentuk suatu relasi yang intim antara seseorang dengan yang lainnya, sebab hakikat pendidikan itu sendiri mendorong masyarakat pada suatu ranah pengetahuan baik secara materi maupun secara non materi (psikologi). Pemahaman akan pendidikan secara materi dan non materi ini pula mendasarkan masyarakat pada sejarah terbentuknya manusia Indonesia yang berpengetahuan, melalui perjalanan panjang yang bermula dari perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan melawan para penjajah, pembentukan diri melalui pendidikan orde lama dan orde baru hingga pada era reformasi pendidikan yang terjadi hingga saat ini.

Perkembangan pendidikan dari zaman ke zaman hingga saat ini tak pernah terlepas dari perkembangan teknologi atau dikenal dengan era digitalisasi. Secara etimologis, istilah digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Digitus* yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Dalam bahasa Inggris, *digital* berarti yang berhubungan dengan jari.⁵ Digital atau lebih sering disebut digitalisasi adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital.

³Bernard Raho, SVD, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 279.

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses pada 18 Oktober 2021.

⁵John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1976), hlm.182.

Era digital muncul karena adanya revolusi yang mulanya dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern.⁶ Era digital menjadi era pembaharu kehidupan masyarakat dengan segala fasilitas canggih yang tersedia dalam berbagai tempat. Manusia secara tidak langsung dibentuk atas dasar alat teknologi yang berkembang yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Hemat saya, era digital adalah era pembentukan manusia karena faktor teknologi.

Berdasarkan dua konsep pengertian pendidikan dan era digital ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan era digital merupakan suatu masa manusia mengenal kehidupan secara menyeluruh dengan lingkungan sekitar melalui bantuan teknologi sebagai mediator antara manusia dengan lingkungannya dan sebagai perencana pembangunan kehidupan manusia selanjutnya.

Kesenjangan Makna Kekuasaan Kaum Elite dan Pendidikan Kaum Akademisi

Realitas praktik pendidikan yang menjadi konsumsi masyarakat pada era ini adalah berjalannya proses belajar mengajar antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa serta diantara sesama kaum akademisi secara baik dan mudah karena penggunaan teknologi yang canggih. Pandangan ini tentunya amat miris bila melihat gugatan para dosen yang merasa bukan sebagai pengajar sekaligus pembimbing mahasiswa melainkan hanya sebagai administrator dalam kelancaran pembangunan dunia pendidikan mahasiswa itu sendiri.⁷

Peralihan tugas dan fungsi semacam ini melengserkan banyak nilai yang terkandung dalam dunia pendidikan Indonesia, seperti lunturnya makna budaya komunikasi antara guru dan siswa, rendahnya pemahaman mahasiswa atas pengenalan materi kuliah, degradasi kapasitas mahasiswa dalam menganalisis materi ajar dan lengsernya kualitas kaum akademisi di mata masyarakat karena kurangnya komunikasi internal bersama dosen. Proses transmisi nilai pendidikan pun menjadi tak terkendali dan semakin ambigu dalam kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya, pendidikan sebagai basis civilisasi seperti kata Max Regus menjadi

⁶M. Prawiro, "Pengertian Digital: Definisi, Sejarah, dan Manfaat Digitalisasi Bagi Manusia", *Maxmanroe*, 6 Januari 2020, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>, diakses pada 18 Oktober 2021.

⁷ Bdk. Bdk. Sumbo Tinarbuko, "Dosen, Intelektual Kampus atau Administrator Pendidikan", *Kompas*, 20 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/20/dosen-intelektual-kampus-atau-administrator-pendidikan>, diakses pada 18 Oktober 2021.

kehilangan identitasnya dalam memanusiation manusia dan mempertahankan sejarah kehidupan yang bergerak dalam “kesalingan” hubungan dengan lingkungan dan yang ilahi.⁸

Pertimbangan kekuatan pendidikan dalam hal komunikasi internal sebagai yang terdepan dalam memanusiation kaum akademik sebenarnya dininabobokan oleh kekuasaan kaum elite yang melampaui kemampuannya sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan ini bertendensi menaikan ‘martabat’ kaum elite dalam kekuatan hartanya dan sebaliknya meluluhlantahkan kekuatan kaum akademisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ragamnya rancangan program kaum elite dalam dunia pendidikan mengubah tugas dosen dan guru menjadi pelaku utama administrasi pendidikan. Neil Postman dalam pandangannya menyatakan bahwa proyek-proyek edukasi yang dicanangkan kaum elite seringkali tidak sesuai dengan praktik-praktik pendidikan yang terjadi di sekolah. Hal ini menimbulkan keadaan sekolah yang menjadi konservatif, terutama karena keadaan pendidikan yang hanya dilihat sebagai tembok pembatas daripada ruang yang lapang untuk pergerakan pikiran.⁹ Pergerakan kaum elite yang tidak terkontrol menjadi jurang pemisah yang dalam antara pembangunan martabat pendidikan Indonesia versus martabat kekuasaan kaum elite. Degradasi kualitas pendidikan ini juga turut memengaruhi makna terdalam dari nilai demokrasi sebagai nilai utama kehidupan di era reformasi ini. Demokrasi yang menjadi akar spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia turut terseret nilainya oleh karena pengaruh kekuasaan kaum elite.

Persoalan kekuasaan kaum elite dalam ranah pendidikan ini memang telah menjadi perhatian bersama publik dalam menakar betapa besar kejatuhan pendidikan bangsa terkhusus kaum akademisi dan kesenjangan yang terjadi karenanya, bahwasannya kinerja demokrasi Indonesia terganggu karena permasalahan korupsi politik kekuasaan dan keterancaman kemerdekaan berekspresi dalam bidang pendidikan bangsa Indonesia.¹⁰ Kesenjangan makna antara kekuasaan elite sebagai penguasa birokrat pendidikan dan pendidikan kaum akademisi yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa inilah satu penyebab yang turut melemahkan demokrasi pendidikan seperti yang dicanangkan pada era reformasi ini.

Bahwasannya pelaksanaan wewenang kekuasaan kaum elite melampaui wewenang yang sebagaimana mestinya sehingga mengalihkan tugas dosen dan guru sebagai pengajar dan pendidik menjadi administrator pendidikan yang bernaung di bawah kekuasaan birokrat

⁸ Rm. Max Regus Pr., MA., “Pendidikan sebagai Basis Civilisasi”, dalam Marianus M. Tapung, S. Fil., M. Pd., *Dialektika Filsafat dan Pendidikan Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan* (Jakarta: Parrhesia Institute, 2012), hlm. xi.

⁹ Neil Postman, *Matinya Pendidikan Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah* (Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2019), hlm.vi-vii.

¹⁰Rm. Max Regus Pr., MA., loc. cit.

pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kesenjangan makna yang terjadi turut mereduksi hakikat negara Indonesia sebagai Negara demokrasi itu sendiri, dalam hal ini harkat dan martabat negara tercederai oleh tindakan segelintir orang yang menyelewengkan makna kekuasaan atas pendidikan demi kecerdasan bangsa.

Netralitas Sikap dan Dialektika Pendidikan

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 terkhusus pada pasal 3 dan 5 yang berbunyi: (3)Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹¹ Eksistensi pendidikan pada hakikatnya mengundang kesepahaman antara kebijakan yang diberikan dengan pelaksanaan praktik sikap pendidikan dalam kehidupan kaum akademisi pada khususnya dan kekuasaan kaum elite seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada pun netralitas sikap dalam pelaksanaan praktik pendidikan adalah sebuah usaha menyadarkan kekuasaan elite pendidikan bahwa kehadiran pendidikan bukanlah suatu pemberdayaan kekuasaan dan kemakmuran diri segelintir orang saja melainkan suatu sikap yang membangun kehidupan banyak orang dengan idealisme pendidikan itu sendiri. Bahwasannya pendidikan bertujuan melahirkan kecerdasan sosial bangsa dengan membaca dan mengikuti perkembangan zaman seperti adanya era digital saat ini tanpa adanya tindakan destruktif terutama pengkotak-kotakkan kekuasaan hanya untuk sebagian kalangan yang mengejar kemakmuran personalnya.

Kecerdasan sosial bangsa yang dibangun pun membawa manusia pada suatu sikap bahwa setiap kaum akademisi memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap realitas sosial yang terjadi sehingga hal ini membawa setiap kelompok atau pribadi pada suatu sikap menghargai serta menghormati hakikat sosial yang ada pada kaum akademisi.¹² Kesepahaman pola pikir dan sikap penghargaan yang tinggi antara kaum elite dengan kaum akademisi mampu

¹¹Vanya Karunia Mulia Putri, "Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya" *Kompas*, 5 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-pasal-31-dan-maknanya>, diakses pada 19 Oktober 2021.

¹²Marianus M. Tapung, S. Fil., M.Pd., *Dialektika Filsafat dan Pendidikan Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan* (Jakarta: Parrhesia Institute), hlm. 99.

mengonstruksi nilai pendidikan di mata masyarakat dan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan kaum elite terhadap penyaluran tugas dan wewenang kaum akademisi sebagai pengajar dan penimba ilmu pengetahuan.

Adapun kehadiran dialektika pendidikan merupakan sebuah usaha menyadarkan hakikat pendidikan dengan dialog yang mempertemukan para penguasa elite pendidikan dengan kaum akademisi dalam setiap kebijakan atau pun pertimbangan yang menyangkut perjalanan kehidupan pendidikan Indonesia itu sendiri. Kaum elite pendidikan sebagai pengampuh kebijakan perlu memahami setiap pemikiran yang diberikan kaum akademisi sebagai promotor utama pendidikan. Sebab, dialektika pendidikan itu juga yang menjadi corong pengenalan manusia pada matra dasar pendidikan terkhusus dalam matra sosial dan matra kultural.

Dalam matra sosial, setiap orang berusaha mengarahkan pendidikan dengan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umum (*bonum communa*) dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi (*vested interest*), dan sebaliknya dalam matra kultural, pendidikan mengalihkan dari satu generasi ke generasi dengan nilai-nilai yang telah diolah seperti pengetahuan, nilai sosial, moral dan agama.¹³ Tak juga lupa dalam hal ini dinyatakan peralihan alur proses pendidikan dengan kehadiran era digital yang menunjang kebutuhan manusia dalam proses interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar tanpa mengubah nilai moral pendidikan itu sendiri. Kehadiran teknologi mampu memperkaya pengetahuan dan menjaga keseimbangan hubungan dari segi kekuasaan elite pendidikan dengan kaum akademisi lewat transparansi sikap, kebijakan dan dialog kehidupan yang tak akan pernah terbatas lewat ruang dan waktu yang disediakan. Hemat penulis, reformasi pendidikan lewat kehadiran teknologi mempererat 'kesalingan' hubungan antara kekuasaan kaum elite dan perjuangan pendidikan kaum akademisi.

Penutup

Pertentangan antara kekuasaan birokrat pendidikan dan pendidikan kaum akademisi dalam era digitalisasi zaman ini barangkali menyembunyikan makna hakikat pendidikan bangsa Indonesia itu sendiri. Kerakusan akan kekuasaan melahirkan kebijakan yang menyudutkan sebagian kelompok yang sedang memperjuangkan banyak nilai dalam praktik kehidupan pendidikan itu sendiri. Esensi kekuasaan sebagai pemberian rakyat yang sebenarnya

¹³*Ibid.*, hlm. 21

dijadikan sebuah tanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup banyak orang dilengserkan dengan menjadikannya sebagai alat memenuhi kepentingan pribadi.

Kekuasaan yang tak proporsional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini selayaknya dijadikan pelajaran dalam dunia pendidikan bahwa pengetahuan yang amat luas tak akan pernah sampai karena banyaknya uang dalam saku para penguasa pendidikan, melainkan usaha sadar dan perjuangan kaum akademisi dalam membangun interaksi dan komunikasi dengan dunia sekitar mereka, membangun kecerdasan bangsa yang berjalan bersama perkembangan teknologi yang mutakhir dan mampu mengubah dunia.

Bahwasannya kehadiran akademisi dalam dunia pendidikan era digital melanggengkan kekuasaan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya netralitas sikap di antara para penguasa elite pendidikan dalam menanggapi perkembangan pendidikan seturut keadaan zaman terutama dalam penyerahan tugas dan wewenang kepada kaum akademisi. Dan atas dasar itu dibangun dialektika pendidikan yang menjerumuskan kekuasaan elite pendidikan pada taraf yang seimbang baik dalam kebijakan maupun dalam praktik sikap pendidikan. Dialektika pendidikan juga yang menjadi sarana bagi pembangunan kecerdasan bangsa dengan pendidikan yang adaptif, dalam hal ini mampu berkolaborasi dengan kemampuan teknologi yang mendorong manusia pada usaha yang kreatif dan inovatif. Hemat penulis, dialektika pendidikan yang dibarengi sikap yang netral meningkatkan mutu pendidikan era digital yang dicanangkan kepada kaum akademisi saat ini.

Daftar Pustaka

- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Kasih, Ayunda Pininta. “Kemendikbud Bakal Upayakan Digitalisasi Sekolah pada 2021” *Kompas*. 28 Oktober 2020
<<https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/28/073913971/kemendikbud-bakal-upayakan-digitalisasi-sekolah-pada-2021?page=all>>.
- Postman, Neil. *Matinya Pendidikan Redefenisi Nilai-Nilai Sekolah*. Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2019.
- Prawiro, M. “Pengertian Digital: Definisi, Sejarah, dan Manfaat Digitalisasi Bagi Manusia”. *Maxmanroe*, 6 Januari 2020, <<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>>.

Putri, Vanya Karunia Mulia. “Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya” *Kompas*, 5 Oktober 2021, <<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-pasal-31-dan-maknanya>>.

Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.

Regus, Max. “Pendidikan sebagai Basis Civilisasi”, dalam Marianus M. Tapung *Dialektika Filsafat dan Pendidikan Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2012.

Tapung, Marianus M. *Dialektika Filsafat dan Pendidikan Penguatan Filosofis atas Konsep dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2019.

Tinarbuko, Sumbo. “Dosen, Intelektual Kampus atau Administrator Pendidikan”. *Kompas*. 20 Oktober 2021, <<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/20/dosen-intelektual-kampus-atau-administrator-pendidikan>>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses pada 18 Oktober 2021.